

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), pengaruh melibatkan daya yang berdampak pada pembentukan karakter, keyakinan, atau perilaku seseorang. Pengaruh ini merupakan kekuatan dari individu atau benda yang hadir di alam, mempengaruhi hal-hal di sekitarnya. Surakhmad (2012) menyatakan bahwa pengaruh merupakan kekuatan yang berasal dari benda atau individu yang dapat menginduksi perubahan pada keyakinan maupun perilaku. Pengaruh adalah kekuatan yang dapat berasal dari banyak hal seperti karakter, individu, barang, keyakinan, dan tindakan seseorang yang memengaruhi lingkungan sekitarnya.

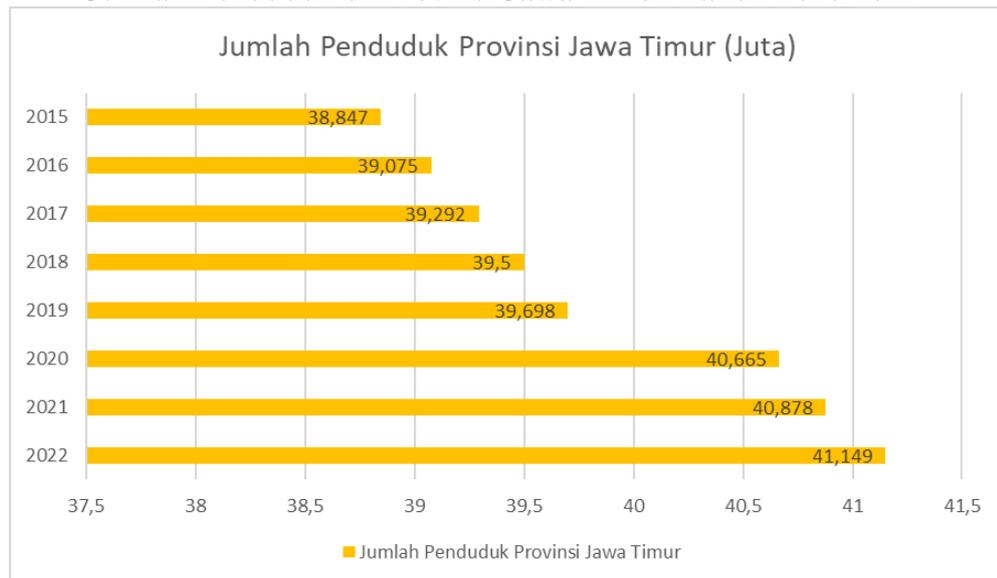
Industri besar di Provinsi Jawa Timur berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja karena pertumbuhan industri yang pesat. Peran sektor industri pengolahan di Jawa Timur sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, sektor manufaktur khususnya segmen besar dan menengah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi Jawa Timur. Industri manufaktur mendominasi kontribusi ekonomi, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan ritel, serta perbaikan mobil dan kendaraan bermotor. BPS Jawa Timur mencatat bahwa kontribusi industri manufaktur terus meningkat hingga mencapai 30,60 persen pada tahun 2022, menyebabkan perubahan struktur ekonomi negara.

Di dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, permasalahan terkait lapangan kerja masih terus mencuat tanpa penyelesaian yang memadai. Provinsi

Jawa Timur perlu menghadirkan peluang kerja yang mencukupi bagi penduduknya.

Peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan penyediaan tenaga kerja. Data statistik menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2022:

Gambar diagram 1.1
Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur 2015-2022

Data pada tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2022. Tercatat bahwa pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah mencapai 41,149 juta orang, sementara pertumbuhan terendah tercatat pada tahun 2015 dengan jumlah 38,847 juta orang.

Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa menyebabkan masalah seperti pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menangani tantangan ini dengan bijaksana.

Data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2021 tersaji dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur 2015-2021

Tahun	Ketenagakerjaan	
	Tenaga Kerja	Pengangguran
2015	19.367.777	906.904
2016	19.114.563	839.283
2017	20.009.220	838.496
2018	20.449.949	850.474
2019	20.655.632	843.754
2020	20.962.967	1.201.145
2021	21.037.750	1.281.395

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur 2015-2022

Dari informasi dalam tabel 1.2, dapat dilihat data terperinci mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2021. Jumlah tenaga kerja mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 21.037 juta orang, sedangkan jumlah terendah tercatat pada tahun 2016 dengan 19.114 juta orang. Jumlah pengangguran mencapai puncaknya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 dengan 1.301 juta orang, sementara jumlah terendah tercatat pada tahun 2017 dengan 838.496 ribu orang. Dari analisis tersebut, tergambar fluktuasi dalam kondisi tenaga kerja dan pengangguran di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2021.

Tujuan penting dalam pembangunan ekonomi melalui industrialisasi adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada kesempatan kerja. (Rochmani, 2016).

International Labour Organization (ILO) adalah satu-satunya organisasi internasional di bawah naungan PBB yang terdiri dari unsur pemerintah,

pengusaha, dan pekerja. Semua kebijakan dan program ILO disusun dan disetujui oleh ketiga unsur tersebut.

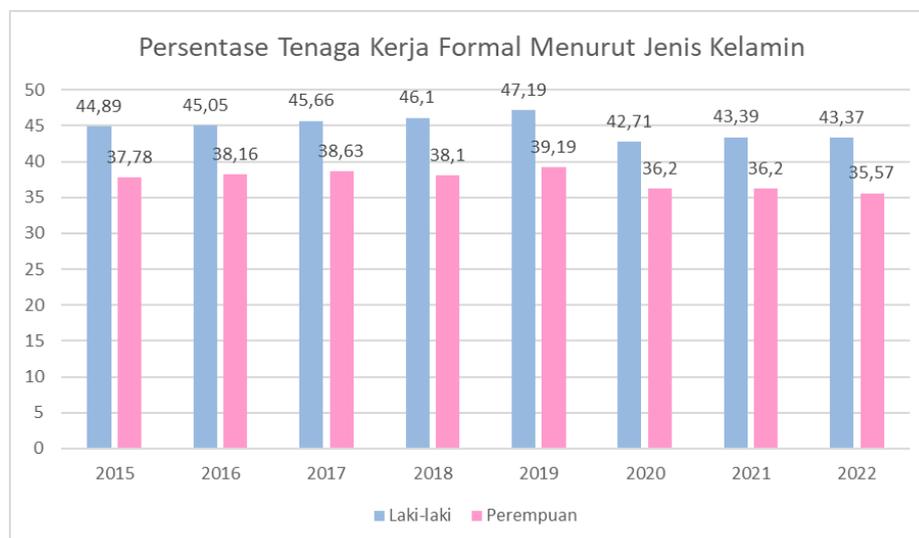
ILO bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan program internasional guna meningkatkan lapangan kerja dan kondisi pekerja, serta menetapkan standar ketenagakerjaan internasional sebagai panduan bagi Negara anggota dalam mengatur kebijakan ketenagakerjaan, terutama dalam menyusun peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, namun tidak secara otomatis mengatasi ketimpangan gender. Isu ketimpangan gender dalam dunia kerja masih menjadi masalah yang umum terjadi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan penggunaan waktu di rumah, tingkat pendidikan, pembatasan sosial-budaya, segregasi sektoral, migrasi, dan akses terhadap sumber daya produktif.

Masih terjadi ketimpangan gender di Indonesia, terutama dalam sektor ketenagakerjaan, yang tercermin dari akses yang lebih rendah bagi perempuan dalam pasar kerja dibandingkan dengan laki-laki dan kecenderungan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.

Berikut adalah Data Persentase Tenaga Kerja Formal Berdasarkan Jenis Kelamin untuk periode tahun itu disajikan 2015-2022, dapat dilihat pada gambar diagram 1.2

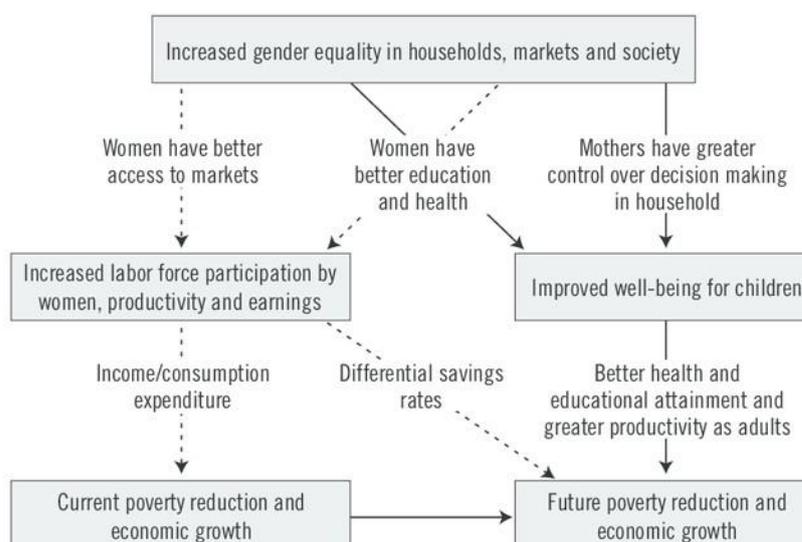
Gambar Diagram 1.2
Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin
Pada tahun 2015-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 1.3 dijelaskan bahwa Persentase tenaga kerja laki-laki lebih tinggi daripada tenaga kerja perempuan. Tetapi pekerja laki-laki maupun perempuan mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2022.

Gambar 1.3



Source: World Bank, 2007

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa dengan meningkatkan kesetaraan gender dalam rumah tangga, pasar, dan masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perempuan yang memiliki akses dalam pasar dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja oleh perempuan, produktivitas dan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Ibu memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anak sehingga di masa depan anak bisa berpotensi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan perempuan yang memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Hak-hak karyawan perempuan terkait libur PMS dan cuti hamil diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003, yang melarang perusahaan mempekerjakan perempuan hamil yang berisiko bagi kesehatannya. Pasal 82 Ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003 mengatur hak cuti keguguran dan Pasal 83 tetap membahas hak menyusui karyawan perempuan. Di samping itu, UU Nomor 3 tahun 1992 mengatur hak biaya persalinan bagi karyawan. Pasal 81 UU Nomor 13 tahun 2003 mengatur hak cuti menstruasi karyawan perempuan.

Peran dan fungsi sosial dalam masyarakat sering menyebabkan ketidaksetaraan gender, terutama terlihat dalam pemilihan jurusan pendidikan yang sering kali dikaitkan dengan fungsi domestik perempuan. Banyak keluarga lebih menekankan pemberian tugas teknologi kepada anak laki-laki dan tugas perawatan kepada anak perempuan.

Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja, baik secara teknis maupun teoritis, sehingga dapat menjadi calon pekerja yang berkualitas.

Data mengenai penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi dan aktivitas pekerjaan di Provinsi Jawa Timur, 2022 dapat ditemukan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur, 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan kerja				
	Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja Total
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	
Sekolah Dasar	9 638 197	251 099	130 929	382 028	10 020 255
Sekolah Menengah Pertama	3 829 987	136 748	150 006	286 754	4 116 741
Sekolah Menengah Atas	6 007 656	201 204	300 610	501 814	6 509 470
Perguruan Tinggi	2 137 453	33 492	51 631	85 123	2 222 576

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Pada tabel 1.2 dijelaskan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja paling banyak pada tahun 2022 berasal dari pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dan angkatan kerja yang menganggur banyak berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tingkat upah minimum dapat mempengaruhi pengaturan dan regulasi pasar tenaga kerja. Pemerintah sering kali mengatur tingkat upah minimum untuk melindungi pekerja dengan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang adil. Upah minimum dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan memberikan perlindungan bagi pekerja yang mungkin diterima dengan upah rendah. Tingkat upah juga berperan dalam ketimpangan pendapatan. Jika tingkat upah sangat tinggi, mungkin hanya sebagian kecil pekerja yang dapat dipekerjakan, sementara sebagian besar pekerja terpinggirkan. Namun, jika

tingkat upah terlalu rendah, pekerja mungkin menghadapi kesulitan finansial dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak gender, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak gender terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana tingkat pendidikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana upah minimum mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak gender terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengidentifikasi dampak tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk memahami pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran sistematis, akurat, dan faktual mengenai berbagai fenomena yang diteliti, termasuk fakta dan hubungan di antara mereka. Pada penelitian ini, tujuannya

adalah untuk mengkaji serta memberikan bukti empiris terkait dampak gender, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data tahun 2018-2022. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, dan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Untuk memperluas pemahaman mengenai isu ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan informasi yang berguna dalam pengambilan kebijakan terkait isu ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan perhatian terhadap penyerapan tenaga kerja untuk menciptakan workforce yang terampil dan terdidik.

2. Manfaat Teoritis

Sumber acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.